**BAB 8**

**MANAJEMEN EVALUASI KEBIJAKAN PUBLIK**

1. **PENDAHULUAN**

# Bab kedelapan akan membahas mengenai manajemen evaluasi kebijakan publik. Bab ini menjadi dasar pemahaman untuk bab berikutnya, utamanya bab tentang analisis evaluasi kebijakan. Uraian bab ini berisi penjelasan tentang konsep-konsep dan langkah-langkah evaluasi kebijakan, pendekatan dan metode evaluasi kebijakan, serta perubahan dan penghentian kebijakan public.

**Kompetensi Dasar**

Mampu memahami Evaluasi Kebijakan Publik yang meliputi : konsep dan langkah-langkah evaluasi kebijakan, pendekatan dan metode evaluasi kebijakan, perubahan dan penghentian kebijakan

**Indikator**

Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa diharapkan dapat:

1. Menjelaskan konsep-konsep dan langkah-langkah evaluasi kebijakan
2. Mendeskripsikan pendekatan dan metode evaluasi kebijakan
3. Mendeskripsikan dan menganalisis perubahan dan Penghentian kebijakan

**Tujuan Pembelajaran**

1. Menguasai konsep-konsep dan langkah-langkah evaluasi kebijakan.
2. Menguasai pendekatan dan metode evaluasi kebijakan.
3. Menguasai cara merubah dan menghentikan kebijakan pasca evaluasi
4. **PENYAJIAN MATERI**
5. **Konsep dan Langkah-Lagkah Evaluasi Kebijakan Publik**

**Konsep dan Makna Evaluasi Kebijakan**

Evaluasi kebijakan berfokus pada pemahaman bahwa sebuah kebijakan public tidak bisa di lepas begitu saja. Kebijakan harus di awasi, dan salah satu mekanisme pengawasan tersebut dikenal sebagai evaluasi kebijakan. Evaluasi kebijakan di sarankan untuk di laksanakan dengan cara komparasi, dengan pilihan-pilihan, mulai dari komparasi dengan tujuan, komparasi dengan historical, komparasi dengan Best practices.

Makna evaluasi di tunjukan untuk menilai sejauh mana keefektifan kebijakan public guna di pertanggungjawabkan kepada konsituennya, juga sejauh mana tujuan yang telah di capai. Evaluasi di perlukan untuk melihat kesenjangan antara “harapan” dan “kenyataan”.

Mengikuti pendapat Dunn (1999;608-610), istilah evaluasi dapat di samakan dengan penaksiran (*appraisal*), pemberian angka (*rating*), dan penilaian (*assessment*). Dengan demikian, evaluasi berkenaan dengan produksi infomasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan, Evaluasi memberi informasi yang valid dan dapat di percaya mengenai kinerja kebijakan, yaitu seberapa jauh kebutuhan, nilai, dan kesempatan telah dapat di capai melalui tindakan public;

Premis yang dikembangkan adalah bahwa setiap kebijakan harus di evaluasi sebelum diganti sehingga perlu ada klausul “dapat di ganti setelah di lakukan evaluasi” dalam setiap kebijakan public. Ada dua alasan pokok mengapa hal ini harus di pegang,yaitu:

1. Menghindari kebiasaan burukadministrasi public Indonesia yaitu “Ganti pejabat, harus ganti peraturan “.
2. Setiap kebijakan tidak dapat diganti dengan serta merta karena “Keinginan” atau “Selera” pejabat yang pada saat itu memegang kewenangan public.

Tujuan pokok pada evaluasi bukanlah untuk menyalah-nyalahkan, melainkan untuk melihat seberapa besar kesenjangan antara pencapaian dan harapan suatu kebijakan public. Tugas selanjutnya adalah bagaimana mengurangi atau menutup kesenjangan tersebut. Jadi evaluasi kebijakan public harus di pahami sebagai suatu yang bersifat positif. Evaluasi bertujuan untuk mencari kekurangan dan menutup kekurangan.

Ada beberapa argumen, mengapa evaluasi diperlukan (Subarsono,2005:123-124), yaitu :

1. Untuk mengetahui tingkat efektivitas suatu kebijakan, yakni seberapa jauh suatu kebijakan mencapai tujuannya.
2. Mengetahui apakah suatu kebijakan berhasil atau gagal. Dengan melihat efektivitasnya, dapat disimpulkan apakah kebijakan gagal atau berhasil.
3. Memenuhi aspek akuntabilitas public. Dengan melakukan penilaian kinerja, maka dapat dipertanggungjawabkan kepada public sebagai pemilik dana dan pengambil manfaat dari kebijakan/program pemerintah.
4. Menunjukkan pada stakeholders (utamanya kelompok sasaran) manfaat suatu kebijakan.
5. Agar tidak mengulangi kesalahan yang sama, dimana hasil evaluasi diharapkan apat ditetapkan kebijakan yang lebih baik.

Nugrooho (2012: 728) mendeskripsikan ciri dari evaluasi kebijakan yang baik, adalah: 1) Tujuan menemukan hal-hal yang strategisuntuk meningkatkan kinerjakebijakan, 2) Evaluator mampu mengambil jarakdari pembuat kebijakan, pelaksana kebijakan, dan target kebijakan, 3) Prosedur dapat di pertanggungjawabkan secara metodologi, 4) Dilaksanakan tidak dalam suasana permusuhan atau kebencian**,** 5)Mencakup rumusan, implementasi, lingkungan dan kinerjakebijakan.

**Langkah-Langkah Evaluasi Kebijakan**

Untuk melakukan evaluasi yang lebih baik dengan margin kesalahan yang minimal, beberapa ahli mengembangkan langkah-langkah dalam evaluasi kebijakan. Suchman yang dikutip oleh Winarno (2002: 169), mengemukakan 6 langkah dalam evaluasi, yakni : 1) Mengidentifikasikan tujuan program yang akan dievaluasi, 2) Analisis terhadap masalah, 3) Deskripsikan dan standarisasi kegiatan, 4) Pengukuran terhadap tingkatan perubahan yang terjadi, 5) Menentukan apakah perubahan yang diamati merupakan akibat dari kegiatan tersebut atau penyebab lain, 6) Beberapa indikator untuk menentukan keberadaan suatu dampak.

Selain itu juga ada beberapa pertanyaan operasional untuk evaluasi kebijakan, yakni : *pertama*, apakah yang menjadi isi dari tujuan program; *kedua*, siapa yang menjadi target program; *ketiga*, kapan perubahan yang diharapka terjadi; *keempat,* apakah tujuan yang ditetapkan satu atau banyak; *kelima*, apakah dampak yang diharapkan besar; *keenam*, bagaimanakah tujuan-tujuan itu dicapai.

Evaluasi kebijakan public memiliki empat fungsi, yaitu: 1) *Eksplanasi,* melalui evaluasi dapat di potret realitas pelaksanaa program dan dapat dibuat generalisasi tentang pola-pola antar berbagai dimensi realitas yang diamatinya. 2) *Kepatuhan,* melalui evaluasi dapat di ketahui apakah tindakan yang di lakukkan oleh para pelaku, baik birokrasi maupun pelaku lainnya, sesuai dengan standard dan prosedur yang di tetapkan oleh kebijakan. 3) *Audit*, melalui evaluasi dapat di ketahui, apakah output benar-benar sampai ketangan kelompok sasaran kebijakan, atau justru ada kebocoran atau penyimpangan. 4) *Akunting*, dengan evaluasi dapat di ketahui apa akibat social-ekonomi dari kebijakan tersebut.

1. **Pendekatan dan Metode Evaluasi Kebijakan**

**Pendekatan Evaluasi Kebijakan**

Ada tiga jenis pendekatan terhadap evaluasi, sebagaimana dijelaskan oleh Dunn (2003), yakni : 1). Evaluasi semu; 2). Evaluasi formal; 3) Evaluasi keputusan teoritis. Tabel dibawah ini menggambarkan pendekatan di atas.

**Tabel 8.1.**

**Pendekatan Evaluasi Kebijakan**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pendekatan** | **Tujuan** | **Asumsi** | **Bentuk-Bentuk Utama** | **Tehnik** |
| Evaluasi Semu | Menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi valid tentang hasil kebijakan | Ukuran manfaat atau nilai terbukti dengan sendirinya atau tidak kontroversial | Eksperimental socialAkutansi systemPemeriksaan socialSintesis riset dan praktek | Sajian grafikTampilan tabel;Analisis seri waktu terinterupsiAnalisis teori terkontrol |
| Evaluasi Formal | Menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang terpercaya dan valid mengenai hasil kebijakan secara formal diumumkan sebagai tujuan program/kegiatan | Tujuan dan sasaran dari pengambil kebijakan dan administrator yg secara resmi diumumkan merupakan ukuran tepat dari manfaat/nilai | Evaluasi perkembanganEvaluasiEksperimentalEvaluasi proses retrospektif (ex post)Evaluasi hasil retrospektif | Pemetaan sasaranKlariifikasi nilaiKritik nilaiPemetaan hambatanAnalisis dampak silangDiscaunting |
| Evaluasi Keputusan teoritis | Menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang terpercaya dan valid mengenai hasil kebijakan yang secara eksplisit diinginkan oleh berbagai pelaku kebijakan | Tujuan dan sasaran dari pelaku yang diumumkan secara formal ataupun diam-diam merupakan ukuran yang tepat dari manfaat/nilai | Penilaian tentang dapat tidaknya dievaluasi Analisis utilitas multi-atribut | BrainstormingAnalisis argumentasiDelphi kebijakanAnalisis survey pemakai |

**Sumber : Dunn, 2003**

Evaluasi semu (*pseudo evaluation*) adalah pendekatan evaluasi yang menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang terpercaya dan valid mengenai hasil-hasil kebijakan berdasarkan sasaran program kebijakan yang telah ditetapkan secara formal oleh pembuat kebijakan.

Evaluasi formal (*formal evaluation*) adalah pendekatan evaluasi yang menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang terpercaya mengenai hasil kebijakan berdasarkan sasaran program kebijakan yang telah ditetapkan oleh pembuat kebijakan. Asumsinya, sasaran dan target yang telah ditetapkan secara formal adalah merupakan ukuran yang tepat untuk melihat manfaat atau nilai program dan kebijakan.

Evaluasi proses keputusan teoritis (*decision theoritic evaluation*) adalah pendekatan evaluasi yang menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang dapat dipercaya dan valid mengenai hasil kebijakan yang diinginkan oleh stakeholders.

Selanjutnya, untuk menilai keberhasilan/kegagalan kebijakan, Dunn (2003:405) memberikan criteria/indicator evaluasi, sebagaimana tampak pada tabel dibawah ini :

**Tabel 8.2.**

**Kriteria/Indikator Evaluasi Kebijakan**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Tipe Kriteria** | **Pertanyaan** | **Ilustrasi** |
| 1 | Efektivitas | Apakah hasil yang diinginkan telah dicapai | Unit pelayanan |
| 2 | Efisiensi | Seberapa banyak usaha diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan | Unit biaya, manfaat bersih, rasio cost-benefit |
| 3 | Kecukupan | Seberapa jauh pencapaian hasil yang diinginkan memecahkan masalah | Biaya tetapEfektiivitas tetap |
| 4 | Perataan | Apakah biaya manfaat didistribusikan dengan merata kepada kelompok yang berbeda | Kriteria pareto, Kriteria Kaldor-Hicks, Kkriteria Rawls |
| 5 | Responsivitas | Apakah hasil kebijakan memuaskan kebutuhan, preferensi atau nilai kelompok tertentu | Konsistensi dengan survey warganegara |
| 6 | Ketepatan | Apakah hasil (tujuan) yang diinginkan benar-benar berguna atau bernilai | Program public harus merata dan efisien |

**Sumber : Dunn (2003)**

Nugroho, 2012: 733, mengklasifikasikan berbagai pendekatan evaluasi dari beberapa ahli, yaitu :

**Lester dan Steward,Jr** (2000), yang mengelompokan evaluasi dalam beragam evaluasi, yaitu : a) evaluasi proses, evaluasi yang berkenaan dengan proses implementasi; b) evaluasi impak, yaitu evaluasi berkenaan dengan hasil dan/atau pengaruh dari implementasi kebijakan; c) evaluasi kebijakan yaitu apakah benar hasil yang di capai mencerminkan tujuan yang berkehendaki; dan d) evaluasi meta- evaluasi yang berkenaan dengan evaluasi berbagai implementasi kebijakan yang ada untuk menemukan kesamaan-kesamaan tertentu.

**Ernest R.House** (1980) membuat taksonomi evaluasi yang cukup berbeda, yang membagi pendekatan evaluasi menjadi: a) pendekatan system, dengan idikator utama adalah efisiensi; b) pendekatan prilaku, dengan indicator utama adalah produktivitas dan akuntabilitas; c) pendekatan fomulasi keputusan, dengan indicator utama adalah kefektifan dan keterjagaan kualitas; d) pendekatan tujuan-bebas (*goal free*), dengan indicator utama adalah pilihan pengguna dan manfaat social; e) pendekatan kekritisan seni (*art criticism*), dengan indicator utama adalah standar yang semakin baik dan kesadaran yang semakin meningkat; f) pendekatan *review professional*, dengan indicator utama adalah penerimaan professional; g) pendekatan kuasi-legal (*quasi-legal*), dengan indicator utama adalah resolusi; h) pendekatan studi kasus, dengan indicator utama adalah pemahaman ata efektivitas.

**Anderson**, membagi evaluasi (implementasi) kebijakan public menjadi tiga pendekatan. *Pertama,* evaluasi kebijakan yang di pahami sebagai kegiatan fungsional yang selalu melekat pada setiap kebijakan public. *Kedua*, evaluasi yang memfokuskan pada bekerjanya kebijakan. *Ketiga,* evaluasi sistematis untuk mengukur kebijakan dan mengukur pencapaian di banding target yang di tetapkan.

**Bingham dan Filbinger**, membagi evaluasi kebijakan menjadi empat jenis, yaitu: a) Evaluasi proses, yang focus pada bagimana proses implementasi suatu kebijakan; b) Evaluasi impak, yang focus pada hasil akhir suatu kebijakan; c) Evaluasi kebijakan, yang menilai hasil kebijakan dengan tujuan yang di rencanakan dalam kebijakan pada saaat di rumuskan; d) Meta-evaluasi, yang merupakan evaluasi terhadap berbagai kebijakan yang terkait.

**Howlet dan Ramesh** (1995) mengkelompokkan evaluasi menjadi tiga yaitu:

1. *Evaluasi administrative*, yang berkenaan dengan evaluasi sisi administrative, anggaran, efisiensi, biaya dari proses kebijakan di dalam pemerintahan yang berkenaan dengan:
2. *Effort evalution*, yang menilai dari sisi input program yang di kembangkan oleh kebijakan.
3. *Performance evalution*, yang menilai keluaran (*output*) dari program yang dikembangkan oleh kebijakan,
4. *Adequancy of performance evalution* atau *efektiveness evalution*, yang menilai apakah program dijalankan sebagaimana yang sudah di tetapkan.
5. *Efficiency evalution*, yang menilai biaya program dan memberikan penilaian tentang keefektifan biaya tersebut.
6. *Process evalutions*, yang menilai metode yang di pergunaka oleh organisasi untuk melaksanakan pogram.
7. *Evaluasi judicial*, yaitu evaluasi yang berkenaan dengan isu keabsahan hukum tempat kebijakan di implementasikan, termasuk kemungkinan pelanggaran terhadap konstitusi, sistem hukum, etika, aturan administrasi negara, hingga hak asasi manusia.
8. *Evaluasi politik*, yaitu menilai sejauh mana penerimaan konstituen politik terhadap kebijakan public yang di implementasikan.

**Metode-Metode Evaluasi**

Untuk melakukan evaluasi terhadap program yang telah diimplementasikan, Subarsono (2005: 128) menjelaskan ada beberapa metode evaluasi, yaitu : (1) *Single program after-only*, (2) *Single program before-only*, (3) *Comparative after-only* dan (4) *Comparative before-only*.

**Tabel 8.3.**

**Metodologi Untuk Evaluasi program**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Jenis Evaluasi** | **Pengukuran Sebelum** | **Pengukuran Sesudah** | **Kelompok Kontrol** | **Informasi yang Diperoleh** |
| ***Single program after only*** | Tidak | ya | Tidak ada | Keadaan kelompok sasaran |
| ***Single program before-after only*** | Ya | ya | Tidak ada | Perubahan kelompok sasaran |
| ***Comparative after-only*** | Tidak | ya | Ada | Keadaan kelompok sasaran dan kelompok kontrol |
| ***Comparative before-after*** | Ya | ya | Ada | Efek program thd kelp sasaran dan klp kontrol |

**Sumber : Subarsono (2005:128)**

Ada pula pemilahan evaluasi sesuai dengan teknik evaluasinya, yaitu:

1. Evaluasi Kompratif, yaitu membandingkan implementasi kebijakan (proses dan hasilnya) dengan implementasi kebijakan yang sama atau berlainan, di satu tempay yang sama atau berlaianan.
2. Evaluasi historical, yaitu membuat evaluasi kebijakan berdasarkan rentang nmuculnya kebijakan-kebijakan tersebut.
3. Evaluasi Laboratium atau ekspremental, yaitu evaluasi namun menggunakan ekspremen yang di letakan dalam sejenis laboratium.
4. Evaluasi ad hock, yaiti evaluasi yang di lakukkan secara mendadak dalam waktu segera untuk mendapatkan gambar pada saat itu (snap shot).
5. **Perubahan dan Penghentian Kebijakan**

Pada dasarnya evaluasi memberikan data dan informasi agar pengambil kebijakan melakukan perubahan-perubahan tertentu sebagaimana yang diharapkan masyarakat. Ditinjau dari maksud dan tujuannya, Wahab (1997:43) menyatakan pemanfaatan hasil temuan evaluasi dapat dibagi menjadi 3 kategori, yaitu :

1. *Instrumental.* Pemanfaatan instrumental (*instrumental use*) terjadi kalau hasil-hasil evaluasi dikutif oleh pihak manajemen program/proyek dan mereka dapat menunjukkan secara meyakinkan bahwa hasil tersebut dapat digunakan dalam pembuatan keputusan atau pemecahan masalah yang dihadapi.
2. *Konseptual.* Pemanfaatan informasi hasil evaluasi dapat disebut telah dimanfaatkan secara konseptual (*conceptual use*) kalau informasi tersebut mempengaruhi sedemikian rupa jalan pikiran pembuat kebijakan mengenai isu tertentu tanpa, pada saat yang sama menyebutkan informasi atau dokumen lainnya.
3. *Persuasif.* Hasil-hasil evaluasi dapat disebut telah dimanfaatkan secara persuasive (*persuasive use*) kalau data evaluasi telah digunakan untuk meyakinkan pihak lain.

Suatu evaluasi kebijakan ditujukan untuk melihat sejauhmana program-program kebijakan yang telah dijalankan mampu menyelesaikan masalah-masalah public. Ini berarti bahwa evaluasi ditujukan untuk melihat sejauhmana tingkat efisiensi dan efektivitas suatu program kebijakan dijalankan untuk memecahkan masalah-masalah yang ada. Efekiivitas berkenaan dengan cara yang digunakan untuk memecahkan masalah, sedangkan efisien menyangkut biaya-biaya yang dikeluarkan.

Tidak semua masalah dapat dipecahkan dengan program kebijakan. Bila kondisi ini terjadi, maka akan menimbulkan pertanyaan mengapa program kebijakan gagal meraih dampak yang diinginkan . Evaluasi berguna untuk melihat sebab-sebab kegagalan tersebut.

Perubahan kebijakan dan penghentian kebijakan, merupakan tahap selanjutnya setelah evaluasi kebijakan. Setelah masalah kebijakan timbul dan kegagalan program diidentifikasikan, maka tahap selanjutnya dalam lingkaran kebijakan (*policy cycle)* adalah perubahan/penghentian kebijakan.

Konsep perubahan kebijakan (*policy change*) merujuk pada penggantian kebijakan yang sudah ada dengan satu atau lebih kebijakan yang lain. Perubahan kebijakan ini meliputi pengambilan kebijakan baru dan merevisi kebijakan yang sudah ada. Anderson dalam Winarno (2002: 182) mendeskripsikan bahwa perubahan kebijakan mengambil tiga bentuk, yakni : *Pertama,* Perubahan incremental pada kebijakan yang sudah ada, dimana kebijaka tidak dirubah seluruhnya, tetapi hanya beberapa bagian saja yang dilakukan perubahan. *Kedua,* Pembuatan status baru untuk kebijakan khusus. Ketiga, Penggantian kebijakan yang besar sebagai akibat dari pemilihan umum kembali, dimana terjadi pergantian rezim sehingga kebijakan diganti secara besar-besaran.

Selanjutnya, perbaikan kebijakan tergantung pada beberapa factor. Faktor-faktor yang berpengaruh pada perbaikan kebijakan meliputi : *Pertama,* kemampuan kebijakan tersebut dalam memecahkan persoalan. Karena itu evaluasi dibuat untuk memecahkan persoalan-persoalan public. *Kedua,* kemampuan kebijakan semacam itu dikelola. *Ketiga,* kelemahan yang mungkin ada selama proses implementasi berlangsung. Keempat, perubahan terhadap kebijakan ditentukan oleh kekuatan politik dan kesadaran dari kelompok-kelompok dimana kebijakan tersebut di tujukan.

Wahab (1997: 46) dengan mengutip pendapat Leviton dan Hughes, menyatakan bahwa secara garis besar menggambarkan kemungkinan penghalangan hasil evaluasi untuk perbaikan kebijakan , berkaitan dengan 3 konsep dasar, yakni : a) Pemanfaatan hasil evaluasi rendah, karena rendahnya kualitas penelitian evaluasi, atau dilihat dari sudut pandang kepentingan pengguna, sama sekali tidak memiliki implikasi praktis. b) Evaluasi tidak dimanfaatkan, karena daya kegunaannya diragukan atau tidak diketahui. c) Evaluasi mungkin tidak membuahka dampak, karena dampak tergantung pada keputusan yang dilakukan oleh banyak individu dalam pemerintahan yang bisa jadi tidak mengetahui apa manfaatnya

1. **RANGKUMAN**

Makna evaluasi di tunjukan untuk menilai sejauh mana keefektifan kebijakan public guna di pertanggungjawabkan kepada konsituennya, juga sejauh mana tujuan yang telah di capai. Evaluasi dapat di samakan dengan penaksiran (*appraisal*), pemberian angka (*rating*), dan penilaian (*assessment*). Dengan demikian, evaluasi berkenaan dengan produksi infomasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan, Evaluasi memberi informasi yang valid dan dapat di percaya mengenai kinerja kebijakan, yaitu seberapa jauh kebutuhan, nilai, dan kesempatan telah dapat di capai melalui tindakan public;

Enam langkah dalam evaluasi, yakni : 1) Mengidentifikasikan tujuan program yang akan dievaluasi, 2) Analisis terhadap masalah, 3) Deskripsikan dan standarisasi kegiatan, 4) Pengukuran terhadap tingkatan perubahan yang terjadi, 5) Menentukan apakah perubahan yang diamati merupakan akibat dari kegiatan tersebut atau penyebab lain, 6) Beberapa indikator untuk menentukan keberadaan suatu dampak.

Ada tiga jenis pendekatan terhadap evaluasi, sebagaimana dijelaskan oleh Dunn (2003), yakni : 1). Evaluasi semu; 2). Evaluasi formal; 3) Evaluasi keputusan teoritis.

Beberapa metode evaluasi, yaitu : (1) *Single program after-only*, (2) *Single program before-only*, (3) *Comparative after-only* dan (4) *Comparative before-only*.

Perubahan kebijakan dan penghentian kebijakan, merupakan tahap selanjutnya setelah evaluasi kebijakan. Setelah masalah kebijakan timbul dan kegagalan program diidentifikasikan, maka tahap selanjutnya dalam lingkaran kebijakan (*policy cycle)* adalah perubahan/penghentian kebijakan

1. **LATIHAN**
2. Jelaskan pemahaman tentang evaluasi kebijakan public dan langkah-langkah dalam evaluasi kebijakan public.
3. Sebutkan minimal 3 pendekatan dalam evaluasi kebijakan public.
4. Deskripsikan secara lengkap dengan menggunakan penyajian tabel metode-metode evaluasi kebijakan public.
5. Analisis kaitan antara perubahan kebijakan dengan hasil kebijakan.
6. Dalam kondisi yang bagaimana sebuah kebijakan harus diterminasi (dihapus).
7. **PUSTAKA RUJUKAN**

Nugroho,Riant.2012. ***Public Policy: Dinamika Kebijakan, Analisis Kebijakan,Manajemen Kebijakan*** . Elex Media Komputindo.Jakarta

Subarsono, AG. 2005. ***Analisis Kebijakan Publik : Konsep,Teori dan Aplikasi.*** Pustaka Pelajar. Yogjakarta.

Wahab,Solichin. 1997. ***Analisis Kebijaksanaa: Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara.*** Bumi Aksara. Jakarta

William,Dunn. 2000. ***Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi Kedua***. Gajahmada University Press. Yogyakarta

-----------------. 2003. ***Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi Keempat***. Gajahmada University Press. Yogyakarta

Winarno,Budi.2002.  ***Teori dan Proses Kebijakan Publik***. Media Pressindo. Yogyakarta.

1. **GLOSSARI**

***Instrumental*** *:* Data atau hasil evaluasi menjadi alat atau dasar bagi keputusan berikutnya.

***Policy cycle*** *:* Tahapan kebijakan yang terdiri dari formulasi, implementasi dan evaluasi kebijakan